



Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berdialog dengan lansia peserta vaksinasi.

KR-Istimewa

PANGLIMA TNI KUNJUNGI CILACAP Vaksinasi Sasar 140.000 Lansia

CILACAP (KR) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito, meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cilacap yang dipusatkan di Patra Graha Pertamina RU IV Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (4/6).

Panglima TNI mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tersebut diprioritaskan bagi kalangan lanjut usia (lansia) dan pralansia, dengan target vaksinasi selama dua hari mampu menjangkau 140.000 lansia dari jumlah total penduduk Kabupaten Cilacap sebanyak 1,9 juta jiwa.

Pelaksanaan kegiatan vaksinasi di Kabupaten Cilacap dinilai sudah cukup bagus, tertib dan lancar. Bahkan dari rencana pelaksanaan selama dua hari itu, pada hari pertama sudah mampu menjangkau 40.000 lansia yang ada di Cilacap. Sedangkan sisanya akan dilaksanakan menyusul dan secara bertahap. "Jadi dari total penduduk Kabupaten Cilacap yang

mencapai 1,9 juta jiwa, yang divaksinasi sekitar 70 persen atau sekitar 1,3 juta jiwa dan vaksinasi itu akan dilaksanakan terus secara bertahap," katanya.

Terkait upaya mitigasi terhadap virus Korona varian baru B 1617.2 asal India yang sempat masuk ke Cilacap melalui ABK Kapal Hilma Bulker pengangkut gula rafinasi, Panglima TNI mengatakan, penanganannya sudah dilakukan dengan baik. Indikatornya, belum ditemukan adanya penyebaran mutasi baru di masyarakat.

Kendati demikian, pihaknya tetap menekankan kepada semua pihak untuk dapat disiplin menerapkan protokol kesehatan. "Tadi kami berpesan juga pada Bupati untuk terus melakukan tracing dan yang penting lagi pelaksanaan 3M," ujarnya.

Dijelaskan, dengan adanya langkah pencegahan atau mitigasi secara berkelanjutan, pihaknya optimis akan dapat menekan jumlah kasus positif Covid-19 serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap. **(Mak)-f**

PEMERINTAH BENTUK SATGAS BLBI Mahfud: Tak Kooperatif Masuk Hukum Pidana

JAKARTA (KR) - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, para obligor kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tidak kooperatif dan proaktif bisa masuk ranah hukum pidana.

"Kalau terjadi pembangkangan meskipun ini perdata, supaya ini diingat kalau disengaja, melanggar keperdataan, bisa saja berbelok ke pidana," katanya dalam Konferensi Pers usai Pelantikan Satgas BLBI di Jakarta, Jumat (4/6).

Mahfud berharap obligor dan debitur kasus BLBI dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut uang negara ini secara baik dengan pemerintah. Mahfud menyatakan, pemerintah sangat menyambut baik jika terdapat obligor atau debitur kasus BLBI yang proaktif yakni datang secara mandiri untuk menyelesaikan masalah, baik menyerahkan barang, aset maupun uang.

Ia menekankan, para obligor dan debitur tidak bisa bersembunyi atau mangkir dari kasus ini mengingat pemerintah telah mengantongi daftar nama seluruh pihak yang terlibat. "Jadi kami tahu anda pun tahu. Jangan, tidak usah saling membuka. Mari kooperatif saja. Kami akan bekerja untuk negara dan Anda harus bekerja juga untuk negara," tegasnya.

Ia menjelaskan, kasus yang masuk dalam hukum perdata ini dapat dialihkan ke hukum pidana karena para obligor dan debitur telah tahu, mereka memiliki utang namun tidak mau mengakuinya. Tak hanya itu, hukum pidana juga dapat dikenakan

pada obligor dan debitur kasus BLBI yang dengan sengaja memberikan bukti palsu dan selalu mangkir dari panggilan.

Mahfud memastikan pemerintah bersama tim satuan tugas (Satgas) BLBI terus melakukan penagihan kepada seluruh pihak yang terlibat. Terlebih lagi, para obligor dan debitur kasus BLBI ini telah merugikan negara hingga mencapai sekitar Rp 110,454 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Tim Satgas BLBI akan memblokir akses para obligor kasus BLBI ke lembaga keuangan, karena telah merugikan negara mencapai Rp 110 triliun. "Ini bisa kita lakukan karena nama-nama mereka jelas dan perusahaannya juga ada, maka dari itu aset tracing menjadi penting dan kemudian obligasi atau kewajibannya bisa diidentifikasi," kata Menkeu. **(Sim/Ant)-f**

KENALI GEJALA 'LONG COVID'

Vaksinasi, Masyarakat DIY Agar Proaktif

YOGYA (KR) - Pemda DIY terus berusaha mengencarkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 baik secara massal maupun melalui pusat-pusat layanan vaksinasi seperti Puskesmas atau instansi terkait lainnya. Kendati demikian, pelaksanaan vaksinasi juga tergantung ketersediaan vaksinasi dari Pemerintah Pusat. Untuk itu, begitu Pemda DIY mendapatkan vaksin dari Pemerintah Pusat langsung diupayakan untuk disalurkan ke masyarakat.

"Saat ini stok vaksin di DIY masih mencukupi sampai Juni ini, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Mengingat vaksinasi ini cukup penting saya minta masyarakat bisa proaktif untuk mensukseskan pelaksanaan vaksinasi. Karena vaksinasi ini sebagai salah satu upaya untuk mengatasi pandemi Covid-19," kata Sekda DIY K Baskara Aji, Jumat (4/6). Baskara Aji menyatakan, sejalan

dengan pelaksanaan vaksinasi, masyarakat harus tetap mengedepankan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Sebab selain jumlah kasus positif Covid-19 di DIY masih fluktuatif, munculnya klaster baru akhir-akhir ini menandakan masih ada sebagian warga yang mulai abai menegakkan prokes. Meski jumlahnya tidak sebanyak bulan-bulan sebelumnya, kondisi tersebut tetap perlu menjadi perhatian bersama. Pada masa pandemi seperti sekarang, penegakan prokes menjadi keharusan dalam setiap aktivitas.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih menyebutkan, kasus positif di DIY bertambah 299 kasus menjadi 45.738 kasus. Pasien sembuh bertambah 161 menjadi 42.057, dan kasus meninggal bertambah lima menjadi 1.208 kasus. Di Jakarta, Kombes Pol dr Yahya

SP, dokter spesialis paru yang juga Kabag Pembinaan Fungsi RS Bha-yangkara R Said Sukanto, mengajak masyarakat untuk mengenali gejala *Long Covid*. Hasil penelitian Perhimpunan Dokter Paru Indonesia menyebutkan, setelah empat pekan sejak mulai merasakan gejala Covid-19 sampai dinyatakan negatif, masih timbul gejala sisa yang disebut *Long Covid*. Pasien Covid-19 perlu mewaspadai hal ini, meski gejala *Long Covid* bisa diatasi secara medis.

Dijelaskan, 53,7 persen pasien merasakan gejala *Long Covid* selama satu bulan, 43,6 persen selama 1-6 bulan, dan 2,7 persen lebih dari 6 bulan. "Gejala *Long Covid* dimulai dari pelemahan fisik secara umum, sesak napas, nyeri sendi, nyeri otot, batuk, diare, kehilangan penciuman, dan pengecapan," terangnya dalam dialog yang diadakan KPC-PEN. **(Ria/Ira/San)-d**

BPD DIY DORONG NASABAH

Konversi ke Kartu ATM Chip



KR-Istimewa

Nasabah Bank BPD DIY diharapkan segera berganti ke kartu ATM chip.

YOGYA (KR) - Selain praktis, layanan digital di bidang keuangan kian diminati masyarakat karena mempermudah transaksi finansial pada masa pandemi ini. Tren peningkatan penggunaan fasilitas perbankan digital juga terjadi di kalangan nasabah Bank BPD DIY.

"Penggunaan ATM dan produk digital lain (BPD DIY Mobile, CMS, Laku Pandai, QUAT) dipandang sebagai alternatif yang dapat diandalkan untuk mengurangi risiko terpapar Covid-19. Jika dibandingkan April 2020 ke April 2021, jumlah pengguna produk digital Bank BPD DIY melonjak drastis hingga 174 persen. Kenaikan juga terjadi pada jumlah pengguna ATM sebesar 24,5 persen," kata Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso

Rohmat, Jumat (4/6).

Santoso Rohmat menyatakan, tidak hanya jumlah pengguna, peningkatan juga terjadi pada volume transaksi. Produk digital non-ATM pada periode yang sama mengalami peningkatan volume transaksi hingga 152,4 persen. Sedangkan volume transaksi menggunakan ATM meningkat 22 persen. Dari sisi keamanan tentu juga menjadi prioritas utama Bank BPD DIY. Saat ini, seluruh mesin ATM dan EDC Bank BPD DIY telah support teknologi chip. Dibandingkan teknologi kartu ATM generasi sebelumnya (magnetic stripe), teknologi chip memiliki tingkat keamanan lebih tinggi.

"Saat ini terdapat 158 terminal ATM dan 231 mesin EDC mini ATM di kantor layanan Bank BPD DIY di seluruh wilayah DIY. Nasabah pengguna kartu ATM/Debit Bank BPD DIY yang bertransaksi di terminal ATM Bank BPD DIY tidak dikenai biaya (untuk transaksi tarik tunai, cek saldo dan mutasi, serta transfer ke sesama rekening BPD DIY)," terangnya.

Santoso Rohmat berharap pemegang kartu ATM lama (magnetic stripe) Bank BPD DIY yang belum mengganti ke kartu ATM chip, segera melakukan penggantian kartu. Penggantian dapat dilakukan di semua kantor layanan Bank BPD DIY dan tidak dikenai biaya. Periode penggantian kartu sampai 31 Juli 2021. PT Bank BPD DIY akan memblokir kartu ATM tipe lama, sehingga tidak bisa digunakan bertransaksi. **(Ria)-f**

Calon Sambungan hal 1

Saya seharusnya berangkat tahun depan, karena terjadi penundaan tahun sebelumnya dan tahun ini, kemungkinan baru 2024. Tentu ini merupakan hak prerogatif dari pemerintah Arab Saudi, sehingga kita berusaha mengikuti proses dan regulasi yang telah dikeluarkan," tutur Tri Saktiyana yang menjabat sebagai Asekda Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY ini di Kompleks Kepatihan, Jumat (4/6).

Kemenag juga telah memberikan opsi kepada jemaah haji baik reguler dan haji khusus yang sudah melunasi biaya perjalanan haji pada 2021 akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji di tahun berikutnya. Dengan adanya penundaan keberangkatan ini, setoran biaya haji bisa diminta kembali atau nantinya dialihkan untuk keberangkatan tahun depan.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, kebijakan pemerintah soal tidak adanya pemberangkatan haji 2021, karena masih dalam suasana pandemi harus disikapi bijaksana. Pihaknya meminta kepada calon jemaah haji dari DIY agar menerima dengan ikhlas. Karena

apapun yang menjadi keputusan pemerintah pusat, Pemda hanya bisa mengikuti.

Menurut Sultan pemberangkatan jemaah haji ini tidak bisa dipaksakan. Terlebih penerbangan ke Arab Saudi juga belum dibuka. Hal yang bisa dilakukan hanya menaati kebijakan yang sudah ada. Mengingat masalahnya tidak hanya berkaitan dengan tidak hanya peniadaan keberangkatan jemaah haji, tapi juga penerbangan yang belum dibuka.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mendorong pemerintah tidak berhenti dan terus berusaha memperjuangkan kuota haji jemaah Indonesia untuk pemberangkatan pada 2021. Alasannya, masih banyak upaya yang dapat ditempuh pemerintah untuk membela kepentingan umat Islam di tanah air bisa menjalankan ibadah haji ke tanah suci.

Ia mememinta Presiden Joko Widodo membuka komunikasi dan diplomasi setingkat kepala negara dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud, demi membahas soal kuota haji Indonesia tahun ini. **(Ria/Ira/Ati)-f**



انلله وانا الیه راجعون

Pemerintah Kota Yogyakarta
Wakil Walikota Yogyakarta dan segenap jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta
Turut berduka atas meninggalnya



H. RUSMADI SUYUTI
(ADIK KANDUNG WALIKOTA YOGYAKARTA Drs. H. HARYADI SUYUTI)
Lahir di Serang, 7 Juni 1966.
(55 TAHUN)

Meninggal dunia pada 4 Juni 2021 pukul 16.15 WIB di Bekasi.
Almarhum meninggalkan istri Hj. Hermawati Santoso dan dua putra/putri,
Keumala Safira Ramadhani dan Muhammad Risandi Suyuti.

Jenazah disemayamkan Sabtu, 5 Juni 2021, di rumah duka
Jl. Ipda Tut Harsono No 4 Yogyakarta (Rumah Dinas Walikota Yogyakarta).
Sholat jenazah akan dilaksanakan pukul 10.00 dan 11.30 WIB.
Pemberangkatan jenazah ke peristirahatan terakhir setelah sholat duhur.

Semoga Husnul Khotimah, dan diterima amal ibadahnya
serta diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT.
Keluarga yang ditinggal diberi ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan.
Aamiin